



Dinamika Politik Afghanistan pasca Mundurnya Uni Soviet hingga Masa *Enduring Freedom*, 1989-2001

Dewi Salindri,¹ Mrr Ratna Endang Widuatie,^{1*} Sri Ana Handayani,¹ Nur Rosyidah¹

¹ Jurusan Sejarah, Universitas Jember, Indonesia

*dewisalindri.sastra@unej.ac.id

Dikirim: 14-11-2023; Direvisi: 31-01-2024; Diterima: 27-06-2024; Diterbitkan: 31-08-2024

Abstrak: Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan politik Afghanistan pasca pendudukan Uni Soviet hingga Operasi *Enduring Freedom*. Studi historis terhadap Afghanistan menggunakan pendekatan teori konflik asimetris diharapkan dapat memberi wawasan alternatif terhadap gagasan perdamaian dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Hasil studi ini berguna bagi penelitian lebih lanjut terhadap dinamika politik, intervensi negara asing, kajian resolusi konflik, serta kajian Asia Tengah kontemporer. Pembahasan penting dalam artikel ini adalah bahwa faksionalisme politik di Afghanistan merupakan potensi konflik karena masing-masing kelompok yang bertikai (*belligerents*) cenderung menggunakan kekuatan bersenjata (*militia forces*) untuk mencapai tujuannya. Permasalahan menjadi kompleks ketika terjadi usaha-usaha menarik dukungan asing untuk menandingi kelompok saingan. Afghanistan menjadi sulit didamaikan karena minimnya usaha pihak bertikai untuk mengakhiri konflik.

Kata Kunci: Afghanistan; Amerika Serikat; konflik; perang; politik; Taliban.

Abstract: This article examines the political transformation in Afghanistan since post-Soviet occupation in 1990s up to Operation Enduring Freedom in early 2000s. Historical studies about Afghanistan with asymmetric conflict approach expected to provide alternative insight on the idea of peace and the world commitment of human rights. Results of this study are useful for further research on political dynamics, foreign intervention, conflict resolution studies, and contemporary Central Asian studies. The main discussion in this article outlines that political factionalism in Afghanistan leads to conflict because every belligerents tends to use militia forces to keep their goals. Afghans' political circumstances become more complicated when the factions attempts to attract foreign forces to encounter each rival groups. The country become more hard to reconcile as well as the lack of efforts by belligerents to halt their rivalry.

Keywords: Afghanistan; conflict; politics; Taliban; United States.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pembabakan sejarah Afganistan umumnya dimulai pada masa pra-Neolitik yang dimulai abad ke-7 SM, daerah wilayah Afghanistan pada masa kini termasuk salah satu lingkup kawasan dari peradaban awal sungai Indus, Mohenjo-Daro dan Harappa yang membentang hingga ke daerah Shortugai, Afghanistan (Conningham dan Manuel, 2009). Kemudian pada masa abad ke-3, Bangsa Skithia (etnis Persia) menempati wilayah Mundigak, Kandahar (Afghanistan) yang saat itu menjadi batas wilayah terpenting dari rivalitas dua kekuatan besar

peradaban yang ada di Shahar-i Sokhta, Iranian-Skithia dan Sotka Koh-Sutkagen Dor, Lembah Indus. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa hasil temuan arkeologis berupa guci/keramik (*pottery*) yang menunjukkan adanya percampuran unsur budaya antara corak lukisan guci/keramik yang berdasarkan kebudayaan Iranian-Skithia dan kebudayaan Indus yang meletakkan pola guci yang sama persis dengan yang ditemukan di kawasan Lembah Indus (Cortesi, *et. al.*, 2008). Berkembangnya Jalur Sutra yang melalui kawasan Shortugai di Kandahar, juga mendorong adanya intensitas mobilisasi perdagangan dan perluasan pemukiman di kawasan tersebut, yang nantinya akan menjadi kontestasi pengaruh kuasa penuh atas kepemilikan kawasan frontier tersebut (McIntosh, 2008). Bangsa Eropa-Mediterranean pada masa itu juga tak ingin kalah untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan frontier di Asia Kecil itu. Contoh saja bangsa Yunani-Seleukia yang berhasil menganeksasi kawasan Baktria, Kandahar, hingga wilayah ujung barat India pada tahun 250 SM (Tarn, 2010). Kontribusi pengelolaan tanah Afghanistan juga tak lepas dengan masa peradaban Islam, yaitu penguasaan Kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 685-705 M (Mason, 2005). Hingga pada masa Dinasti Durrani, Ahmad Shah Durrani berhasil menyatukan etnik-etnik yang terfragmentasi ke dalam integrasi Afghanistan (Saikal, 2007).

Sejak Raja Amanullah Khan memproklamkan kemerdekaan dari imperialisme Inggris pada 19 Agustus 1919, kondisi politik di Afghanistan dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional relatif aman dan stabil. Namun situasi mulai memburuk tatkala masa Perang Dingin, tepatnya pada 17 Juli 1973, Perdana Menteri Afghanistan Muhammad Daud Khan mengubah bentuk negara dari monarki ke republik dengan meng kudeta Raja Afghanistan, Zahir Shah (Rubin, 2002). Pemerintahan Daud Khan tidak berlangsung lama, karena pemerintahannya dikudeta oleh Nur Muhammad Taraki pada 27 April 1978 saat Revolusi Saur meletus (Shahab, 1987). Partai-partai mulai bermunculan dengan dua polarisasi faksi yaitu Islamis dan Komunis. Uni Soviet menyuntikkan pengaruh politik kepada Afghanistan berlangsung dari 1979 hingga 1989 untuk mengamankan posisi PDPA (Partai Komunis Afghanistan) selama masa konflik berlangsung (Cahyo, 2018). Sebagai bentuk perlawanan intervensi Uni Soviet yang sekaligus menjadi jalan masuknya komunisme, faksi Islam mengumpulkan para militan ekstremis Pan-Islamisme dari berbagai negara Islam, salah satunya jaringan Al-Qaeda dari Arab Saudi yang dipimpin jutawan dari keluarga bin Laden, Osama (Mason, 2005). Intervensi Uni Soviet berakhir dengan de-sovietisasi Afghanistan pada 1989 dan memberikan kuasa penuh pada Afghanistan selama masa transisi ke Negara Islam Afghanistan pada tahun 1992 hingga 2001 (Abbas, 2014). Hingga mundurnya Uni Soviet di Afghanistan di tahun 1992, konflik sipil bersenjata masih berlanjut dan saling memperebutkan supremasi di Afghanistan, yang melibatkan faksi-faksi politik baru Mujahidin.

Dinamika perpolitikan masih berlanjut pasca Negara Islam Afganistan. Permasalahan ini menarik untuk dikaji, karena pluralitas etnik di Afghanistan mendapatkan argumen representasi melalui polarisasi politik untuk meraih legitimasi perpolitikan (Kaelola, 2009; Subakti, 2010). Kajian ini terbatas pada ruang lingkup Afghanistan dengan spasial negara Afghanistan dan temporal dari tahun 1992 hingga 2001. Tujuan utama kajian ini antara lain: (1) Memahami latar belakang dinamika politik Afghanistan pasca masa transisi pemerintahan; (2) Menjabarkan

bentuk-bentuk dari dinamika politik selama masa transisi hingga Operasi *Enduring Freedom*; dan (3) Memahami dampak dari dinamika politik Afghanistan pada masa transisi.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) yang ditunjang dengan pendekatan kajian konflik asimetris (*asymmetrical conflict*). Menurut Louis Gottschalk (1987) bahwa metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Ada empat tahapan dalam merekonstruksi peristiwa sejarah kajian yaitu: (a) pengumpulan sumber, yang berasal dari studi kepustakaan buku, artikel jurnal, berita, dan *website* pendukung (khususnya kelembagaan terkait seperti PBB); (b) memilah bahan-bahan yang tidak otentik (kritik eksternal) dan menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya (kritik internal); (c) menginterpretasikan analisis kajian dengan keilmuan politik melalui sintesis atas penelitian-penelitian terdahulu serta temuan termutakhir; dan terakhir (d) menyusun menjadi suatu kisah atau penyajian narasi sejarah (historiografi).

Dalam konteks militer dan politik, konflik asimetris dipahami sebagai sebuah situasi pertikaian bersenjata di mana pihak-pihak yang berkonflik (*belligerents*) berada pada situasi kesiapan, kemampuan, dan kesenjataan yang tidak seimbang. Pendapat ini berlaku luas dan fleksibel, serta mengakomodasi perbedaan perspektif para pakar. U.S. Army War College misalnya, merumuskan bahwa "asimetris" dalam terminologi strategis militer dan keamanan nasional adalah "tindakan, pengaturan, serta pola pikir yang berbeda dengan pihak lawan untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki, serta mengeskplotasi kelemahan di pihak lawan." (Cassidy, 2003). Konflik asimetris dalam tulisan ini juga kami lihat sebagai salah satu sebab penyumbang tingginya korban (*casualties*) di kalangan warga sipil Afghanistan. Ungkapan "peluru tidak memiliki mata" berlaku dalam perang asimetris, dengan kecenderungan terjadinya pertempuran di pemukiman dan dampak serangan udara yang menempatkan warga sipil dalam posisi paling rentan.

Melalui pendekatan konflik asimetris, dapat tersusun paparan deskriptif-analitis terhadap perkembangan situasi politik di Afghanistan yang mengarah kepada konflik. Tulisan ini menjadi suatu penjelasan diakronis terhadap peristiwa demi peristiwa secara kronologis yang menyebabkan timbulnya perang, siapa pihak yang terlibat, serta dampaknya terhadap penduduk sipil dan kepada kondisi Afghanistan sebagai sebuah negara.

Secara konsep, tulisan ini melihat ada keterkaitan antara faksionalisme Afghanistan dengan kemunculan Taliban, organisasi milisi yang awalnya adalah komunitas pelajar. Taliban menguat karena berhasil mendapatkan dukungan baik dari dalam maupun luar negeri secara relatif solid –hal yang tidak bisa dilakukan oleh faksi-faksi politik terdahulu. Namun demikian, ketika Amerika Serikat melancarkan Operasi *Enduring Freedom* pada 2002, Taliban dengan cepat kembali menjadi milisi. Situasi ini menjadikan konflik Afghanistan berubah menjadi bersifat asimetrik; karena Amerika Serikat dan pasukan koalisi hadir sebagai entitas negara sementara Taliban melawan sebagai kelompok insurjen. Dalam situasi ini, rakyat Afghanistan berada dalam posisi serba salah karena dituntut "bermuka dua" di depan kedua pihak demi keselamatan mereka.

Hasil Penelitian

Kondisi Awal Afghanistan pasca de-Sovietisasi

Afghanistan merupakan negara yang termasuk dalam kawasan Asia Selatan yang beribukota di Kabul. Letak geografisnya berbatasan dengan Iran di sebelah barat, Pakistan di sebelah tenggara dan timur, di sisi utara berbatasan dengan Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan, serta sebagian kecil berbatasan dengan China. Afghanistan didiami oleh masyarakat yang terdiri atas suku, etnis dan budaya yang beragam. Terdapat setidaknya delapan suku/etnis dengan dialek yang berbeda. Suku-suku tersebut di antaranya Pashtun 40%, Tajiks 30%, Hazara 10-15%, Uzbek 13%, dan lainnya seperti Baluch, Turkmen, Aimaq dan Kirghiz (Nojumi, 2002). Masyarakat Afghanistan tidak memiliki kesamaan latar belakang kesukuan dan kesamaan etnis, maka perbedaan etnis tersebut terhubung berdasarkan identitas nasional, yang paling menonjol adalah persamaan agama yaitu Islam. Penganut Agama Islam di Afghanistan terbagi atas 80% populasi adalah Muslim Sunni, 19% Muslim Syiah, dan kelompok agama lain kurang dari satu persen populasi (State.gov, 2017; Barfield, 2010).



Gambar 1. Peta Pembagian Administratif Afghanistan

Sumber: Library of Congress, <https://www.loc.gov/resource/g7631f.ct002464>

Pada tahun 1992, pembagian wilayah administratif Afghanistan terdiri atas 30 provinsi diantaranya Badakhshan, Badghis, Baghlan, Balkh (Mazar-i Sharif), Bamiyan, Farah, Faryab, Ghazni, Ghowr, Helmand, Herat, Jowzjan, Kabul, Kandahar, Kapisa, Khost, Kunar, Kondoz (Kunduz), Laghman, Lowgar, Nangarhar, Nimruz, Nurestan, Oruzgan, Paktia, Paktika, Parvan, Samangan, Sar-i Pol, Takhar, Wardak, dan Zabul (ISO 3166 Maintenance Agency, 2023).

Afghanistan berusaha melakukan politik "de-Sovietisasi" secara berangsur-angsur pada masa transisi 1989 hingga 1992 dibawah pemerintahan sementara Republik Demokratik

Afghanistan yang dipimpin presiden Muhammad Najibullah. Pada tanggal 18 Maret 1992, Najibullah mengundurkan diri sebagai Presiden dan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin faksi *Jamiat-e Islami*, Burhanuddin Rabbani yang membentuk pemerintahan Republik Islam Afghanistan (UN General Assembly, A/47/128-S/23737).

Faktor utama adanya konflik adalah persaingan politik yang didasarkan sebagian besar pada latar belakang etnis dan aliran agama. *Jamiat-e Islami* didominasi oleh etnis Tajik, yang dikenal sebagai kelompok etnis yang banyak merepresentasikan kaum intelektual di Afghanistan. *Hezb-e Islami* sebagian besar terdiri dari etnis Pashtun (Maley, 1998). Pertentangan di antara faksi *Hezb-e Wahdat* dengan *Ittihad-e Islami* selain karena persaingan politik, juga berdasarkan pada perbedaan sekte agama; *Hezb-e Wahdat* beraliran Syi'ah, sedangkan *Ittihad-e Islami* beraliran Wahabi (Rabush, 2021).

Faksi-faksi politik baru (*Mujahideen*) Afghanistan yang terlahir dari etnosentris dan religiosentris yang terkonstruksi pada masa intervensi Uni Soviet, mulai mencari panggung politik pasca finalisasi usaha de-Sovietisasi Afghanistan 1992 (Green, 2017). Pemerintahan baru yang dibentuk dengan difasilitasi PBB akhirnya menjalankan pemerintahan, namun menghadapi berbagai kesulitan yang sebagian beraal dari internal mereka sendiri. Para pemimpinnya tidak memiliki tujuan yang jelas karena persatuan mereka didasarkan pada perlawanan terhadap Uni Soviet dan Pemerintah Afghanistan, bukan pada platform politik populer mana pun. Tak satu pun dari tujuh pemimpin partai Peshawar yang benar-benar menyetujui pemerintahan baru dan telah melakukan pertempuran di dalam Afghanistan atau menciptakan basis politik nasional (Barfield, 2010).

Dari Republik Islam Afghanistan ke Perang Sipil

Jalannya sistem kenegaraan Republik Islam Afghanistan di tahun 1992 hingga 1994 didominasi usaha kelompok *Mujahideen* yang memegang teguh eksistensi politik identitas. Selain itu, adanya dukungan dan bantuan asing juga memperburuk terjadinya konflik di antara faksi-faksi di dalam *Mujahideen* sendiri, yaitu *Hezb-e Islami* didukung oleh Pakistan, *Hezb-e Wahdat* didukung oleh Iran, dan *Ittihad-e Islami* didukung oleh Arab Saudi. *Mujahideen* memperebutkan kekuasaan melalui serangan-serangan militer terhadap pemerintah di ibu kota Kabul. Faksi *Hezb-i Islami* yang dipimpin oleh Gulbuddin Hekmatyar merupakan faksi paling dominan dalam menentang pemerintah. Hekmatyar dan Rabbani terkunci dalam konflik dan peperangan yang berlangsung sejak tahun 1992 sampai tahun 1994 (Maley, 1998).

Pada tahun 1994, muncul kelompok penentang baru dari kalangan pelajar madrasah di Kandahar yang menamakan diri mereka "*Taliban*" berusaha menghentikan perang dan mewujudkan ketertiban serta keamanan. Gerakan Taliban dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar merupakan kelompok yang merasa tidak puas dan dirugikan dengan adanya kekacauan yang disebabkan oleh konflik internal *Mujahideen* dalam pemerintahan, sehingga gerakannya mendapat dukungan dari masyarakat Afghanistan pada umumnya (Ahmad, 2022).

Usaha kelompok Taliban pada rentang tahun 1994 hingga 1996 yang berusaha menstabilkan faksi politik baru (*Mujahideen*), menimbulkan negara Afghanistan dalam status quo dan perang sipil (Maley, 1998). 26 September 1996 Mullah Muhammad Omar (Taliban)

mengambil alih Ibu Kota Kabul dan mengubah sistem pemerintahan Afghanistan dari Republik Islam menjadi Keamiran Islam (Nojumi, 2002). Muhammad Omar menetapkan hukum Islam sebagai hukum resmi negara dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, di antaranya; pelarangan permainan dan tarian tradisional, musik, televisi, festival dan segala macam olahraga, serta menerapkan hukum ketat terhadap perempuan (Wahab, 2007).

Kepemimpinan Omar pada awalnya benar-benar membawa ketertiban serta keamanan dalam negeri, tetapi masyarakat kembali dibuat resah atas kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Muhammad Omar memperkuat posisi di pemerintahan dengan bantuan dari pemimpin milisi Al-Qaeda, Osama bin Laden baik berupa dana maupun politik. Sebaliknya, Osama bin Laden mendapatkan “konsesi” untuk mendirikan serta mengoperasikan kamp pelatihan Al-Qaeda di Afghanistan (Abbas, 2014).



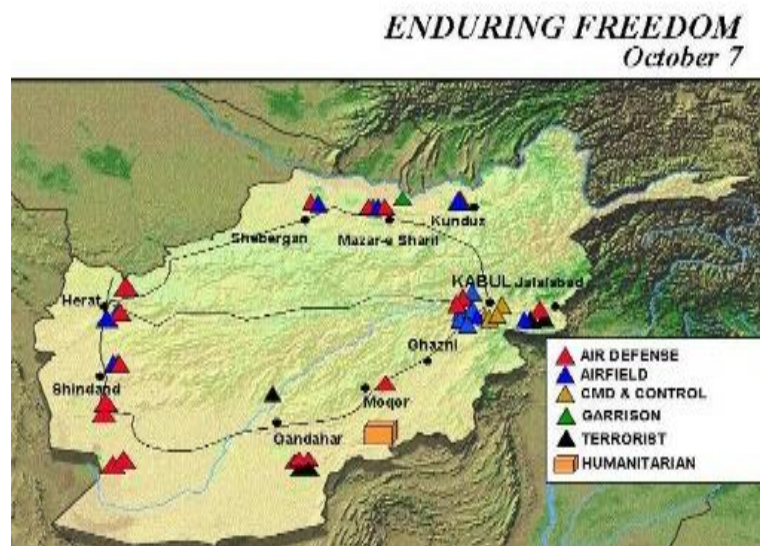
Gambar 2. Peta Faksionalisme di Afghanistan (1996)

Sumber: CNN – World News Story Page, <http://edition.cnn.com/WORLD/9610/16/afghanistan/index.html>

Sisa pendukung Presiden Rabbani kemudian membentuk *Northern Alliance* atau Aliansi Utara yang dipimpin oleh panglima Ahmad Shah Massoud untuk melawan Muhammad Omar. Selama Muhammad Omar berkuasa, keamanan benar-benar dijaga ketat walaupun tetap mendapatkan perlawanan dari Aliansi Utara (Goodson, 2001). Selama rentang tahun 1996 hingga 2001, perang saudara di Afghanistan sudah tak terelakkan yang nantinya berkelindan dengan insiden 9/11 di New York, Amerika Serikat (Mani, 2021).

Afghanistan dalam Operasi Enduring Freedom

Pada tanggal 11 September 2001 terjadi pengeboman menggunakan dua pesawat penumpang yang dibajak dan ditubrukkan ke arah menara kembar pencakar langit *World Trade Center* (WTC) di Kota New York. Aksi teror ini diduga dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Peristiwa tersebut, mengakibatkan pemerintah Afghanistan berada dalam posisi sulit karena secara politis memberikan perlindungan terhadap Osama bin Laden. Presiden Amerika Serikat, George Walker Bush memberikan ultimatum kepada Al-Qaeda dan Pemerintah Afghanistan untuk menyerahkan Osama namun permintaan tersebut ditolak oleh Muhammad Omar karena tidak ada bukti yang kuat. Penolakan tersebut, mengakibatkan motif Presiden George W. Bush untuk mengeluarkan ultimatum sekaligus menggelar operasi militer skala penuh dengan kode “*Enduring Freedom*” pada 7 Oktober 2001 yang berisikan pengiriman militer AS ke Afghanistan untuk “menanggulangi” jaringan terorisme” –demikian dalih politik Amerika Serikat terhadap serangan tersebut (Machmudi, 2021). Serangan militer Amerika Serikat mengakibatkan runtuhnya rezim Afghanistan yang dipimpin oleh Muhammad Omar.



Gambar 3. Peta serangan udara 7 Oktober 2002 yang mengawali Operasi Enduring Freedom di Afghanistan

Sumber: William Hartung, “Failure In Afghanistan, Over 40 Years in the Making”.
<https://www.forbes.com/sites/williamhartung/2021/08/18/failure-in-afghanistan-over-40-years-in-the-making/>

Setelah runtuhnya pemerintahan Mullah Muhammad Omar pada akhir 2001, Afghanistan kembali ke status quo seperti sebelum tahun 1995 yaitu komandan Mujahidin membagi Kota Kabul dan wilayah non-Pashtun di wilayah utara. Namun pada 22 Desember 2001, berdasarkan Perjanjian Bonn, seorang tokoh Pashtun, Hamid Karzai ditetapkan sebagai ketua Otoritas Sementara Afghanistan sebagai otoritas yang berwenang melakukan pemilihan umum

untuk kembali membangun negara dengan membentuk pemerintahan baru yang diakui oleh dunia internasional (Runion, 2007; Gomez-Amich, 2018).

Situasi hak asasi manusia secara keseluruhan sangat buruk di sepanjang tahun 2000-2001. Pemerintah dianggap melakukan dan/atau membiarkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Otoritas Taliban melakukan penegakan keadilan berupa pembunuhan politik dan pembunuhan *extrajudicial* lainnya. Masyarakat Afghanistan mengalami praktik kebijakan yang sangat membatasi atau menyangkal hak asasi manusia berupa perampasan-perampasan (Agustina, 2021). Pihak-pihak yang bertikai menunjukkan pengabaian total terhadap perlindungan warga sipil dan hukum humaniter internasional (Country Information & Policy Unit Immigration and Nationality Directorate, 2002).

Ekonomi Afghanistan yang dibangun tahun 1990-an pada dasarnya telah runtuh, namun masih ditopang oleh produksi opium serta (masih) bantuan asing di bidang militer dan ekonomi. Hampir tidak ada industri yang berfungsi dan kegiatan ekonomi yang paling “bersemangat” adalah perdagangan transit, penanaman opium, pembuatan dan penyelundupan heroin serta pertanian skala kecil lainnya (Goodson, 2001). Namun ketika pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat menduduki Afghanistan, bisnis opium menghadapi tantangan karena pasukan Amerika Serikat juga melakukan operasi “*counternarcotics*” atau penumpasan kegiatan produksi dan distribusi opium. Pemerintah Amerika Serikat beralasan opium digunakan untuk mendanai pihak lawan khususnya Taliban, serta sebagian dana penjualan opium juga diterima oleh pejabat-pejabat yang “korup” (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 2007).

Selain akibat perang, Afghanistan dilanda kekeringan parah yang berkepanjangan pada tahun 1999 dan berlangsung hingga akhir tahun 2001. Semakin banyak warga yang kehilangan mata pencaharian dan mengungsi. Masyarakat mengalami malnutrisi telah memburuk secara signifikan, dan kematian akibat kelaparan telah dilaporkan. Dampak kekeringan telah diperparah oleh konflik yang berkelanjutan di beberapa bagian negara (khususnya di Afghanistan timur laut dan tengah) dan oleh kondisi rusaknya sistem irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya. Singkatnya, struktur ekonomi Afghanistan menjadi sangat lemah, terdistorsi, dan menjadi lebih rentan selama dua dekade konflik (Wall & Byrd, 2022).

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Afghanistan pada rentang tahun 1992-2001 disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kondisi politik yang tidak stabil, figur pemimpin-pemimpin yang secara kewibawaan lemah, intervensi berlebihan oleh pihak asing dengan agenda masing-masing, munculnya kelompok-kelompok perlawanan yang berbeda secara etnis dan sekte agama, sehingga memunculkan adanya politik identitas yang melebarkan kesatuan negara. Perang saudara melibatkan banyak kelompok dari masing-masing latar belakang dan kepentingan. Kelompok-kelompok tersebut saling menyerang satu sama lain dengan persenjataan dan bantuan dari negara lain seperti Pakistan, Iran dan (secara tidak langsung) Amerika Serikat. Dalam rentang tahun 1992-2001, wilayah-wilayah di Afghanistan terus berpindah tangan, sementara kekacauan dalam negeri tidak pernah benar-benar aman dari serangan bom, senapan,

dan artileri. Dampak yang ditimbulkan dari konflik berkepanjangan adalah masyarakat Afghanistan tidak dapat membentuk sistem pemerintahan yang benar-benar diakui secara internasional dan pemerintahan yang sesuai dengan jati diri bangsa, sehingga pada akhirnya pemerintah kembali dibentuk oleh campur tangan asing. Selain itu, perang mengakibatkan persebaran pengungsi Afghanistan meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun, pendidikan serta kesehatan juga memprihatinkan, sehingga berdampak pada kondisi ekonomi menjadi lemah dan kondisi Afghanistan pasca penarikan pasukan koalisi dapat dikatakan sebagai *failed state* atau negara gagal.

Daftar Rujukan

- Abbas, H. (2014). *The Taliban Revival: Violence and Extremism On The Pakistan Afghanistan Frontier*. Wales: Yale University Press.
- Agustina, Hiqma Nur. (2021). *Perempuan Afghanistan: Represi dan Resistensi*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Akaha, Abduh Zulfikar. (2006). *Siapa Teroris? Siapa Khawarij?* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Azami, A. S. (2021). Warlords, the United States, and the state of anarchy in Afghanistan. *Central European Journal of Politics*, 7(1), 46-75. https://doi.org/10.24132/cejop_2021_1.
- Azzam, A. (1986). *Perang Afghanistan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Barfield, T. (2010). *Afghanistan: A Cultural and Political History*. New Jersey: Princeton University Press.
- Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. (2007). *U.S. Counternarcotics Strategy for Afghanistan*. Washington, DC: U.S. Department of State.
- Cahyo, A. W. N. (2018). *Perang Dingin*. Pontianak: Derwati Press.
- Cassidy, Robert M. (2003). *Russia in Afghanistan and Chechnya: Military Strategic Culture and the Paradoxes of Asymmetrical Conflict*. Carlisle: US Army War College.
- Clements, F. A. (2003). *Conflict In Afghanistan: A Historical Encyclopedia*. California: Abc-Clio, Inc.,.
- CNN World News Story Page (1996). "Taliban, government forces prepare for face-off." <http://edition.cnn.com/WORLD/9610/16/afghanistan/index.html>
- Coningham, R. A. E. & Manuel, M. J. (2009). Priest-kings or puritans? Childe and willing subordination in the Indus. *European Journal of Archaeology*, 12(1-3), 167-180. <https://doi.org/10.1177/1461957109339691>.
- Cortesi, E. et al. (2008). Cultural Relationships beyond the Iranian Plateau: The Helmand Civilization, Baluchistan and the Indus Valley in the 3rd Millennium BCE. *Paléorient*, 34(2), 5-35. <https://doi.org/10.3406/paleo.2008.5254>.
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik Edisi Kedua*, Depok: Rajawali Pers.

Global Security, (n.d.) "Operation Enduring Freedom–Maps: Chronological Maps Showing Airstrikes, Aidrops and other Military Actions of Operation Enduring Freedom" <https://www.globalsecurity.org/military/ops/enduring-freedom-maps.htm>.

Gomez-Amich, M. (2018). Life in Conflict: A Series of Narratives by Locally Recruited Interpreters from Afghanistan. *Close Encounters In War Journal*, 1, 22–44.

Goodson, L. P. (2001). *Afghanistan's endless war: state failure, regional politics, and the rise of the Taliban*. Washington DC: University of Washington Press.

Gottschalk, L. (1987). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Green, N. (Ed.). (2017). *Afghanistan's Islam: From Conversion to the Taliban*. Oakland: University of California Press.

Haidari, A. J. et al. (2023). Main Factors of Lack of Economic Development in Afghanistan. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(2), 1-12. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i2.803>.

ISO 3166 Maintenance Agency No. 1-6, [online] https://web.archive.org/web/20081218103224/http://www.iso.org/iso/iso_3166-2_newsletter_i-6_en.pdf. Diakses pada tanggal 03 April 2023.

Kaelola, A. (2009). *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.

Malik, H. (Ed.) (1987). *Soviet-American relations with Pakistan, Iran, and Afghanistan*. New York: Palgrave Macmillan.

Mani, R. (2021). Terrorism, Security and Democracy: 20 Years after 9/11. *Cadmus* 4(5), 103–126.

Mason, C. (2005). *A Short History of Asia*. New York: Palgrave Macmillan.

McIntosh, J. (2008). *The Ancient Indus Valley: New Perspectives*. St. Barbara, California: ABC-CLIO.

Musta'id, A. (2022). Sejarah Islam dan Politik Afghanistan. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 6(2), 214–227. <https://doi.org/10.29408/fhs.v6i2.6605>

Olesen, A. (1995). *Islam and Politic In Afghanistan*. Abington: Routledge.

Rabush, T. V. (2021). Iran's position regarding the Afghan military conflict in 1978-1979. *RUDN Journal of World History*, 13(1), 7-20. <https://doi.org/10.22363/2312-8127-2021-13-1-7-20>

Saikal, A. & William M. (1991). *Regime Change In Afghanistan: Foreign Intervention And The Politics Of Legitimacy*. New York: Westview Press.

Samarqandi, M. (2022). Afghanistan, the Taliban and the liberation narrative: Why it is so vital to be telling our own stories. *Asia Pacific Network*, 28(1/2), 162-172. <https://doi.org/10.24135/pjr.v28i1and2.1238>

Smith, B. (2005). Afghanistan, 1989-1996: Between the Soviets and the Taliban. *Tesis*

Dewi Salindri, Mrr Ratna Endang Widuatie, Sri Ana Handayani, Nur Rosyidah

Dinamika Politik Afghanistan pasca Mundumya Uni Soviet hingga Masa *Enduring Freedom*, 1989-2001

University Honors Program, Miami University.

State.gov, "Afghanistan" [online] <https://2009-2017.state.gov/documents/organization/171751.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2023.

Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Tarn, W. W. (2010). *The Greeks in Bactria and India*. London: Cambridge University Press.

Tuwu, D. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Kendari: Literacy Institute.

United Nation, (1992) General Assembly, Security Council, The situation in Afghanistan and its Implication for International Peace and Security, A/47/128-S/23737, 20 Maret 1992, Appendix [online]. <https://digitallibrary.un.org/record/234284>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2022.

Wahab, S. & Youngerman, B. (2007). *A brief history of Afghanistan*. New York: Infobase Publishing.

Wall, J. & Byrd, W. (2022) Brief Overview of Afghanistan's Economy" [online] <http://web.worldbank.org/archive/website00811/WEB/PDF/AFOVERVW.PDF>. Diakses pada tanggal 12 November 2022.

Wallace, Shane. (2016). Greek Culture in Afghanistan and India: Old Evidence and New Discoveries. *Greece & Rome*, 63(2), 205-226. <https://doi.org/10.1017/S0017383516000073>.